

## BAB 2

### KRISIS FINANSIAL ASIA 1997-1998

Untuk dapat memahami penyebab terjadinya krisis finansial di Indonesia, maka sangatlah penting untuk terlebih dahulu memahami kondisi Indonesia pada saat terjadinya krisis baik krisis finansial Asia 1997-1998 maupun krisis global 2008. Dalam Bab II ini, penulis akan memaparkan proses awal krisis finansial Asia 1997-1998 serta proses masuk krisis ini ke Indonesia dan reaksi Indonesia atas krisis ini.

#### 2.1 Proses Awal terjadinya Krisis Finansial Asia 1997-1998

Krisis Asia Timur menyebar hampir ke sebagian negara di dunia. Krisis ini pertama kali dimulai pada 2 Juli 1997 ketika Thailand mendeklarasikan ketidakmampuan untuk membayar hutang luar negerinya. Kesalahan perputaran krisis oleh beberapa peneliti dibagi berdasarkan negara-negara yang tertimpa masalah – khususnya Thailand, Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan – para ahli baik dalam pemerintahan maupun swasta, yang melakukan deregulasi krisis, dan para peminjam dan pemberi pinjaman, bankir dan investor yang melakukan *rush* dalam meminjamkan mata uang asing dan mengentikan sementara peminjaman. Krisis Asia tampaknya sangat mengejutkan karena Macan Asia Timur berkembang secara pesat pada tahun 1980-an dan 1990-an. Tindakan berkelompok dari karakteristik macan kemudian membentuk besarnya pinjaman atas mata uang asing, investasi spekulatif pada real estate dan koreksi mata uang terhadap dollar AS, yang berdampak pada *overvaluation* terhadap mata uang mereka seiring dengan meningkatnya tingkat harga domestik mereka. Pejabat Hong Kong menetapkan kontrol atas suku bunga dengan meurunkan batas yang diijinkan untuk pinjaman sektor konstruksi – dari 90 persen pada awal tahun 1990an menjadi 60 persen pada pertengahan tahun 1990an – sehingga suku bunga dapat meningkat tanpa timbulnya kerugian besar

pada pinjaman bank. Terdapat perbedaan antara negara-negara; Pemerintahan Thailand sebagai contoh sangat jujur, lemah, dan tidak mampu melakukan sebuah penetapan; sedangkan pemerintahan Indonesia korup, kuat, dan sangat memiliki ketetapan. Kebijakan yang dihasilkanpun berbeda. Thailand mengalami kerugian \$ 24 miliar dari aset cadangannya ketika mempertahankan baht dari serangan spekulator, dan menjadikan baht terdepresiasi. Secara kontras, Indonesia melepaskan rupiah untuk bergerak mengambang segera setelah berkembangnya tekanan spekulasi. Mahathir Muhammad menimpakan kesalahan pada spekulasi asing, termasuk George Soros dari Quantum hedge fund, yang meolak menjual cepat rupiah; Mahathir menekankan moratorium terbatas untuk pembayaran kembali hutang luar negeri.<sup>1</sup>

Menyebarnya krisis ke Rusia dan Brazil sebagian besar disebabkan oleh faktor psikologis karena pasar finansial mengenal bahwa negara-negara ini memiliki sejumlah besar hutang dan *overvaluasi* mata uang mereka, dan pada kasus Rusia, pemerintahannya sangat korup. Penyebab timbulnya ledakan di Russia pada awal tahun 1990an adalah mulai ditinggalkannya sistem Komunis dan meluasnya privatisasi. Akibatnya, euforia menghasilkan *overtrading* dan investasi modal yang ekstrem, dengan maraknya korupsi mengakibatkan besarnya jumlah uang yang keluar namun tidak tepat sasaran. Pasar saham jatuh pada 11 Agustus 1998, diikuti dengan mengambanginya nilai mata uang Ruble enam hari kemudian.<sup>2</sup>

Permasalahan Brazil merupakan akibat dari deregulasi, defisit fiskal yang besar, pemberhentian sementara aliran modal masuk, dan kerugian pasar ekspor di Asia, khususnya bahan baku kayu untuk kertas. Depresiasi kedua dan mengambanginya sektor riil pada awal tahun 1999 mengakibatkan peningkatan harga saham dan apresiasi sektor riil.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Aliber, C. P. (2005). *Manias, Panics and Crashes: A History of Financial Crises (Fifth Edition)*. New York: Palgrave Macmillan, p. 121-122

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> Ibid

## 2.2 Proses Awal Masuknya Krisis Finansial Asia 1997-1998 di Indonesia

Perkembangan perekonomian Asia Timur termasuk Indonesia pada tahun 1990-1996 sangatlah fenomenal. Indonesia digambarkan pada tahun-tahun sebelum terjadinya krisis sebagai negara dengan pertumbuhan perekonomian yang sangat baik. Hal ini tercermin melalui indikator-indikator makro ekonomi Indonesia seperti tingkat pertumbuhan PDB, perkembangan nilai investasi, aliran modal, pergerakan nilai tukar, dan tingkat inflasi (Tabel 2.1).<sup>4</sup>

**Tabel 2.1<sup>5</sup>**

### Indikator-indikator Makroekonomi Indonesia Sebelum Krisis Finansial Asia

Indikator Makro Ekonomi	Tahun	Besaran
Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) Perkapita	1975	USD 265
	1997	USD 785
Perkembangan Nilai Investasi	1990-1996	11,5%
Aliran Modal	1996	USD 6.194 miliar
Pergerakan Nilai Tukar	1996	Rp. 2.342,3
Tingkat Inflasi	1996	7,9%

Sumber: Sjamsul Arifin, *Bangkitnya Perekonomian Asia Timur: Satu Dekade setelah Krisis*, 2008

Selama lebih dari dua dekade, tingkat pertumbuhan PDB per kapita kawasan Asia Timur termasuk Indonesia meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan kawasan lainnya di dunia. Berdasarkan data pertumbuhan investasi riil Asia Timur (*East Asian Real Fixed Investment Growth*) yang dikutip dari data World Bank-*compound annual average growth* selama kurun waktu

<sup>4</sup> Sjamsul Arifin. (2008). *Bangkitnya Perekonomian Asia Timur: Satu Dekade setelah Krisis*. Jakarta: PT. Elex Media Computindo, p.15

<sup>5</sup> Ibid

1990-1996, kelima negara di kawasan Asia Timur dapat dikatakan menunjukkan tingkat pertumbuhan investasi yang cukup tinggi. Sampai dengan tahun 1996, secara umum aliran modal menunjukkan peningkatan. Kondisi tersebut antara lain merupakan dampak positif dari sejumlah liberalisasi sektor keuangan yang telah mulai diluncurkan oleh Indonesia. Berbagai kebijakan liberalisasi tersebut dilakukan untuk memperlancar arus modal, sehingga dapat menunjang pembangunan ekonomi yang berkesinambungan.<sup>6</sup>

Berubahnya kondisi perekonomian Indonesia yang sangat meyakinkan menjadi keterpurukan pada tahun 1997-1998 merupakan sebuah situasi yang berbeda dengan situasi yang terjadi di Thailand. Terdapat beberapa kelemahan utama: sistem keuangan yang terbuka yang tidak didukung oleh pengawasan yang baik, nilai tukar mata uang tetap yang efektif, serta aliran dana investasi asing yang masuk secara besar dan cepat, terutama pinjaman jangka pendek. Seperti Thailand, akumulasi dari kondisi ini berarti bahwa ketika mata uang berada dalam tekanan inflasi – dalam kasus Indonesia, karena efek menular – perekonomian menjadi sangat lemah. Kemudian, kita dapat memahami siklus yang serupa yaitu: keluarnya pinjaman jangka pendek guna mengantisipasi depresiasi nilai tukar mata uang asing, nilai mata uang jatuh dan berdampak pada permasalahan serius bagi para debitur yang tidak memiliki jaminan pinjaman luar negeri. Aksi *rush* dalam membeli dollar bagi para debitur ini semakin memperburuk nilai tukar, pembayaran hutang bahkan menjadi lebih sulit dan meningkatkan ancaman tidak dapat terbayarnya pinjaman. Hal ini menyebabkan modal semakin deras keluar serta nilai tukar semakin jatuh, kelalaian dalam membayar hutang luar negeri menjadi kenyataan.<sup>7</sup>

Banyak peneliti menyatakan bahwa karakteristik utama dari sektor makro ekonomi Indonesia jauh lebih kuat daripada Thailand. Hal Hill (1998 p. 8) menyatakan: "...hampir setiap indikator teknis ekonomi terlihat aman." Inflasi rendah; meskipun substansial, defisit neraca pada saat itu terhadap rasio PDB

---

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> MacIntyre, A. (1999, April). *Political Institutions and the Economic Crisis*. Dipetik Februari 10, 2010, dari <http://www.icsead.or.jp/>: <http://www.icsead.or.jp/7publication/workingpp/wp1999/99-08.pdf>, p. 15-16

masih berada pada level kurang dari setengah defisit yang terjadi di Thailand; tidak terdapat efek gelembung perekonomian yang besar seperti yang terjadi di Thailand (atau negara lainnya); dan tidak terdapat penarikan modal keluar secara signifikan atau penurunan pada pasar modal sebelum krisis. Sektor keuangan Indonesia sangatlah lemah dan kelemahan ini semakin memperparah permasalahan ekonomi Indonesia terutama ketika terjadinya krisis. Dengan pengalaman yang pada pasar keuangan terbuka, perusahaan-perusahaan Indonesia mengajukan pinjaman langsung dari bank asing. Konsekuensinya, meskipun sistem perbankan Indonesia diperbaiki, krisis tetap meluas karena akar permasalahan krisis 1998 bukan berasal dari sektor perbankan.<sup>8</sup>

Nilai tukar mata uang rupiah relatif stabil sebelum terjadinya Krisis Finansial Asia 1997-1998. Kondisi ekonomi yang kondusif pada masa sebelum krisis memberikan kontribusi positif pada nilai tukar yang relatif stabil. Selain itu, tingkat inflasi yang relatif stabil merupakan salah satu indikator yang memperkuat gambaran kondisi perekonomian Indonesia yang sangat baik. Kestabilan tersebut memberikan efek tular positif antara lain kepastian usaha bagi investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Sehingga di era 1990-an kawasan Asia dinilai sebagai kawasan yang paling menarik dan sangat menjanjikan.<sup>9</sup>

Namun dalam hal pondasi non-ekonomi (secara politis) RI menghadapi berbagai kendala yang cukup prinsipal antara lain: dari segi non-ekonomi—yang dalam hal ini menitikberatkan pada indikator-indikator politik—kondisi Indonesia sebelum terjadinya krisis finansial Asia relatif tidak bergejolak karena meskipun Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi, namun pada kenyataannya Presiden Soeharto pada masa pemerintahannya menjalankan model pemerintahan otoritarian. Memasuki Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun kedua yang secara resmi dimulai pada tahun 1993 manuver-manuver politik Soeharto terlihat berubah dimana Soeharto memberikan posisi politik yang strategis bagi BJ Habibie. Hal ini menandakan bahwa mulai tumbuhnya pluralisme di kalangan

---

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> Sjamsul Arifin. (2008). *Bangkitnya Perekonomian Asia Timur: Satu Dekade setelah Krisis*. Jakarta: PT. Elex Media Computindo, p. 15-32

elite pemerintah, yang berarti juga mulai tumbuhnya potensi-potensi konflik di dalamnya. Kontrol politik Soeharto pada era 1990-an sangatlah kuat tercermin dari dominasi Soeharto di partai GOLKAR dimana dia berhasil mendudukkan Harmoko sebagai pemimpin GOLKAR serta menempatkan BJ Habibie sebagai Dewan Pembina GOLKAR yang bertugas menyeleksi anggota Dewan Pelaksana Harian GOLKAR dan kemudian menetapkan dua anak Soeharto (Bambang Trihatmodjo dan Siti Hardiyanti/Tutut) duduk dalam Dewan Pelaksana Harian GOLKAR. Tujuannya jelas agar GOLKAR sepenuhnya berada dalam kontrolnya. Soeharto demikian berjaya menempatkan tentara dan GOLKAR langsung dibawah kontrolnya secara 'personal'.<sup>10</sup>

Pada awal 1990-an, Militer tumbuh sebagai kekuatan utama dibalik kekuatan politik Soeharto. Militer kemudian semakin memperkuat dukungannya terhadap kekuatan negara dengan menciptakan birokrasi yang responsif dan suportif, loyal, angkatan bersenjata yang terintegrasi dengan baik, legislatur yang patuh pada eksekutif, sistem partai yang disederhanakan dan diperlemah, presidensial yang semakin kuat, dan pers yang dikontrol. Orde Baru Soeharto memusatkan proses pengambilan kebijakan di posisi pimpinan, meningkatkan dominasi militer disekitar eksekutif, parlemen, dan otoritas yudisial, dan meningkatkan kekuatannya di tingkat desa. Tujuannya adalah untuk menjamin sentralisasi dominasi militer oleh rezim Soeharto dari Jakarta.<sup>11</sup>

Pada pemerintahan Soeharto, masyarakat tidak dapat berpartisipasi secara utuh dalam pelaksanaan demokrasi, seperti halnya dalam pemilihan umum yang dilaksanakan selama kurun waktu pemerintahan Soeharto. Masyarakat umumnya tidak dapat menentukan pilihan secara bebas akibat adanya intervensi maupun tekanan-tekanan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang cukup kuat. Meskipun tidak pernah secara nyata terdapat bukti-bukti intervensi Soeharto terhadap pemilu yang berlangsung, namun hal ini sudah menjadi rahasia umum. Akibat dikontrolnya media serta lembaga-lembaga tinggi

---

<sup>10</sup> Syamsul Hadi. (2005). *Strategi Pembangunan Mahathir&Soeharto: Politik Industrialisasi dan Modal Jepang di Malaysia dan Indonesia*. Jakarta: Pelangi Cendekia, p. 312-313

<sup>11</sup> Zainuddin Djafar. (2006). *Rethinking the Indonesian Crisis*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya.

pada saat itu dibawah kekuasaan Soeharto, kemudian berimbas pada sulitnya masyarakat untuk dapat mengkomunikasikan keluhan-keluhan mereka terhadap pemerintahan yang berkuasa saat itu. Sehingga anggapan yang kemudian muncul dan berkembang adalah bahwa Indonesia pada masa pemerintahan Soeharto sangatlah aman, damai, tentram, dan sejahtera. Hilangnya kebebasan dalam memilih ini kemudian yang dapat melanggengkan kekuasaan Soeharto sebagai Presiden selama 32 tahun.

Lamanya periode kekuasaan Soeharto ternyata kemudian dijadikan sebagai sebuah instrumen untuk dapat melakukan tindakan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dari orang-orang terdekat Soeharto. Bahkan anak-anak dari Soeharto sendiri kemudian menggunakan kesempatan ini untuk memperluas jaringan bisnis mereka melalui jaringan yang kuat serta permodalan yang juga sangat kuat. Hal yang sangat mustahil pada masa itu apabila terdapat orang-orang “diluar” lingkaran Soeharto yang dapat mengembangkan sayap bisnisnya. Kegiatan KKN selama masa pemerintahan Soeharto seperti telah menjadi sebuah “kebudayaan” bagi masyarakat Indonesia. KKN tidak hanya terjadi pada level orang-orang terdekat Soeharto, tapi juga terjadi di dalam kehidupan masyarakat umum.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa kondisi Indonesia secara ekonomi pada saat sebelum krisis cukup relatif stabil. Perkembangan tersebut di era Pemerintahan Soeharto menunjukkan pertumbuhan yang relatif mantap. Kondisi tersebut selanjutnya makin menumbuhkan kepercayaan pasar investor asing untuk menanamkan modalnya ke Indonesia. Banyaknya investasi yang masuk ke Indonesia kemudian dipergunakan untuk melakukan pembangunan di segala bidang guna memajukan kesejahteraan rakyat.

**Tabel 2.2**

**Investasi Langsung ke Indonesia (bersih) 1997-1998**

<b>Periode</b>	<b>FDI</b>
Juni 1997	1.267

**Universitas Indonesia**

Periode	FDI
September 1997	1.409
Desember 1997	-307
Maret 1998	-485
Juni 1998	367
September 1998	-144
Desember 1998	55

Sumber: Data Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, Bank Indonesia<sup>12</sup>

Menurut Hal Hill apabila melihat perspektif pada bulan April, sebelum krisis dimulai, kondisi perekonomian Thailand tidak begitu sehat jika dibandingkan dengan Indonesia. Tahun 1997, modal asing sudah mulai keluar dari Thailand. Namun para pemodal asing itu tetap dengan mantap masuk ke Indonesia. Demikian juga dengan pasar modal. Ketika pasar modal di Bangkok sudah merosot, di Jakarta justru meningkat. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa Indonesia lebih sehat daripada Thailand.<sup>13</sup>

Dengan pertumbuhan perekonomian yang cukup menjanjikan ini, kebanyakan para ahli ekonomi menilai bahwa Indonesia tidak akan terkena krisis finansial yang maha dahsyat. Krisis finansial Asia yang berdampak pada Indonesia pada awalnya bermula di Thailand pada Juli 1997 dimana Pemerintahan Thailand memutuskan untuk menghapus kebijakan nilai tukar mata uang tetap dan membiarkan mata uang Thailand, Baht, untuk diperdagangkan secara bebas di pasar mata uang. Hal ini kemudian menyebabkan Baht mengalami devaluasi

<sup>12</sup> Bank Indonesia. [http://www.bi.go.id/biweb/Templates/Statistik/Default\\_SEKI\\_ID.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID={F24C392F-6565-43E0-915F-AAFB10F31BFC}&NRORIGINALURL=/web/id/Statistik/Statistik%2bEkonomi%2bdan%2bKeuangan%2bIndonesia/Data%2bQuery/%3fsec%3d8&NRCACHEHINT=Gues](http://www.bi.go.id/biweb/Templates/Statistik/Default_SEKI_ID.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID={F24C392F-6565-43E0-915F-AAFB10F31BFC}&NRORIGINALURL=/web/id/Statistik/Statistik%2bEkonomi%2bdan%2bKeuangan%2bIndonesia/Data%2bQuery/%3fsec%3d8&NRCACHEHINT=Gues). Dipetik November 15, 2010, dari www.bi.go.id.

<sup>13</sup> <http://www.tempo.co.id/ang/min/03/09/ekbis3.htm>. (1998, Mei 2). Dipetik November 24, 2010, dari www.tempo.co.id.



besar-besaran. Jatuhnya mata uang Baht kemudian memberikan dampak yang sangat besar di kawasan Asia Timur khususnya Asia Tenggara dimana negara-negara di kawasan ini termasuk Indonesia ikut masuk dalam pusaran krisis finansial.

**Tabel 2.3**

**Perbandingan Baht dan Rupiah**

<b>Mata Uang</b>	<b>Periode</b>	<b>Sistem Kurs</b>
<b>Baht<sup>14</sup></b>	Sebelum 1963	Kurs Mengambang
	1973	Kurs Tetap
	1984-1997	Kurs Mengambang Terkontrol
	1997	Kurs Mengambang
<b>Rupiah<sup>15</sup></b>	1971-Maret 1983	Sistem Nilai Tukar Tetap
	April 1983 – Sep 1986	Sistem Nilai Tukar Mengambang Terkendali secara ketat
	Sep. 1986 – Agt. 1997	Sistem Nilai Tukar Mengambang Fleksible
	14 Agustus 1997	Sistem Nilai Tukar Mengambang bebas

Sumber: diolah dari berbagai sumber

<sup>14</sup> *Historial Exchange Rate Regime of Asian Countries*. (2000). Dipetik November 24, 2010, dari [intl.econ.cuhk.edu.hk](http://intl.econ.cuhk.edu.hk): [http://intl.econ.cuhk.edu.hk/exchange\\_rate\\_regime/index.php?cid=2](http://intl.econ.cuhk.edu.hk/exchange_rate_regime/index.php?cid=2)

<sup>15</sup> Prasetyo, A. D. (2010, Mei 10). *KURS di INDONESIA: MEKANISME DAN DAMPAKNYA*. Dipetik November 24, 2010, dari <http://strugglemoment.wordpress.com>: <http://strugglemoment.wordpress.com/2010/05/10/kurs-di-indonesia-mekanisme-dan-dampaknya/>